



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu dinas;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang pertanahan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Perhubungan terdiri dari:
    1. Seksi Pengelolaan Terminal;
    2. Seksi Prasarana Perhubungan; dan
    3. Seksi Pengelolaan Parkir.

- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengujian Kendaraan;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
    - 3. Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas.
  - e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
    - 1. Seksi Pertanahan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman; dan
    - 3. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan, pertanahan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Sekretaris

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi;
- d. pengkoordinasian tatalaksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan advokasi hukum;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

#### Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Kepala Bidang Perhubungan

Pasal 12

- (1) Bidang Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (2) Bidang Perhubungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang perhubungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bidang Perhubungan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Terminal;
  - b. Seksi Prasarana Perhubungan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan Parkir.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan.

Pasal 16

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengelolaan terminal.

Pasal 17

Kepala Seksi Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang prasarana perhubungan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pengelolaan parkir.

Bagian Keempat  
Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 19

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan lalu lintas angkutan jalan .
- (2) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang lalu lintas angkutan jalan
- b. pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas angkutan jalan ;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Seksi Pengujian Kendaraan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
  - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengujian kendaraan.

Pasal 24

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas menyiapkan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional.

#### Pasal 25

Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dampak lingkungan lalu.

#### Bagian Kelima

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 26

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 27

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) melaksanakan tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.
- b. pelaksanaan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Pertanahan;
  - b. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman; dan
  - c. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 30

Kepala Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan.

#### Pasal 31

Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 32

Kepala Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sarana prasarana utilitas umum

#### Bagian Keenam Kepala UPTD

#### Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

#### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 36

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.



- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

### BAB V KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 42

Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 28 Nopember 2016  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009